

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 5, Juni 2025, P. 310-317

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15621742>

Dampak Kebijakan Ekonomi Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Muhammad Lutfi Yahya¹, Waze Ridha Yushi Arifin², Muhammad Naufal Fauzan Irawan³,
M Fahri Rizwar⁴, Vhamvilla Rulvi⁵, Muflih Saeful Fath⁶, Dinda Fiachsania Maharani⁷, Dian
Herdiana⁸

Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: lutfiyahya596@gmail.com, ridhayushi@gmail.com, naufalzoldyck@gmail.com, mfahririzwar@gmail.com,
rulvisyarah@gmail.com, muflihsfatih@gmail.com, fiachsaniamaharani@gmail.com, dianherdiana@uinsgd.ac.id

Abstract

Public economic policy is an important instrument the government uses to regulate the economy to achieve social welfare goals. Public economic problems are problems of fulfilling the needs and welfare of the community. Related to the government's large role in ensuring welfare achievement, this study aims to analyze the impact of public economic policies on macroeconomic stability and the distribution of public welfare. This study uses a qualitative descriptive method with a literature study data collection technique. Literature studies enrich research literature so that conclusions can be drawn by reading articles in journals, books, and other media as reference sources. The success of public economic policies is highly dependent on effective planning, implementation, and supervision that is responsive to the socio-economic conditions of the community.

Keywords : *impact; policy; economy*

Abstrak

Kebijakan Ekonomi Publik merupakan instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian guna mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Masalah Ekonomi Publik pada prinsipnya adalah masalah pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan peran pemerintah yang besar dalam menjamin tercapainya kesejahteraan Masyarakat, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan ekonomi publik terhadap stabilitas makro ekonomi dan distribusi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Studi kepustakaan dipakai untuk memperkaya literatur penelitian agar dapat ditarik sebuah kesimpulan dengan cara membaca artikel pada jurnal, buku dan media lainnya sebagai sumber acuan. keberhasilan kebijakan ekonomi publik sangat tergantung pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang efektif serta responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: *dampak; kebijakan; ekonomi*

Article Info

Received date: 23 May 2025

Revised date: 27 May 2025

Accepted date: 4 Juni 2025

PENDAHULUAN

Kebijakan ekonomi publik adalah serangkaian kebijakan dan tindakan yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, kebijakan ini mencakup pengelolaan pengeluaran publik, perpajakan, subsidi, serta intervensi lainnya yang mempengaruhi alokasi sumber daya di masyarakat. Di tingkat daerah, kebijakan ekonomi publik memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah melalui intervensi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal

Dampak kebijakan ekonomi publik terhadap sektor-sektor ekonomi sangat beragam tergantung pada fokus dan implementasinya. Kebijakan fiskal seperti belanja pemerintah dan pajak daerah dapat merangsang sektor-sektor produktif seperti industri manufaktur, agribisnis, dan pariwisata, sehingga meningkatkan peningkatan nilai tambah ekonomi lokal. Namun, kebijakan yang kurang tepat sasaran dapat menyebabkan distorsi pasar atau alokasi sumber daya yang tidak efisien, yang akhirnya dapat menghambat pertumbuhan sektor-sektor tertentu.

Studi kasus daerah yang berhasil menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi publik yang tepat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Misalnya, daerah yang fokus pada dukungan fiskal untuk UMKM dan pengembangan infrastruktur produktif mampu mencatatkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang konsisten dan pertumbuhan lapangan kerja yang berkelanjutan. Keberhasilan ini umumnya ditopang oleh sinergi antara kebijakan fiskal dengan kebijakan pembangunan daerah lainnya yang terintegrasi.

Sebaliknya, terdapat juga studi kasus di mana kebijakan ekonomi publik gagal memberikan dampak positif seperti yang diharapkan. Faktor penyebab kegagalan ini antara lain adalah buruknya perencanaan, ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi riil daerah, serta lemahnya kapasitas implementasi pemerintah daerah. Akibatnya, pendanaan publik tidak efektif dan pertumbuhan ekonomi daerah stagnan atau bahkan menurun.

Untuk itu, rekomendasi yang penting adalah perlunya evaluasi periodik dan monitoring kebijakan yang telah dijalankan agar dapat diperbaiki secara dinamis. Pemerintah daerah juga disarankan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan serta memperkuat kapasitas kelembagaan agar kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal. Selain itu, penyesuaian kebijakan berdasarkan karakteristik ekonomi dan sosial daerah menjadi kunci untuk memaksimalkan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Studi kepustakaan dipakai untuk memperkaya literatur penelitian agar dapat ditarik sebuah kesimpulan dengan cara membaca artikel pada jurnal, buku dan media lainnya sebagai sumber acuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Ekonomi Publik sebagai Instrumen Pemerintah Daerah

Kebijakan ekonomi publik merupakan sekumpulan tindakan dan strategi yang dirancang oleh pemerintah untuk mengarahkan, mengelola, dan mengendalikan aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah demi mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi makro, kebijakan ini memainkan peran penting sebagai instrumen intervensi negara terhadap perekonomian yang tidak berjalan efisien akibat adanya kegagalan pasar, ketimpangan distribusi, atau ketidakstabilan makroekonomi. Secara umum, kebijakan ekonomi publik mencakup kebijakan fiskal, moneter, serta regulasi dan pengawasan sektor-sektor ekonomi strategis. Namun, dalam konteks pemerintahan daerah, dimensi kebijakan ekonomi publik lebih banyak berfokus pada aspek fiskal dan tata kelola ekonomi lokal karena keterbatasan kewenangan daerah terhadap kebijakan moneter yang bersifat sentralistik.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ruang gerak pemerintah daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi publik menjadi lebih luas. Otonomi ini memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya sendiri, menetapkan prioritas pembangunan, dan merancang strategi ekonomi yang sesuai dengan potensi serta karakteristik wilayah masing-masing. Hal ini menjadi penting karena perbedaan geografis, sosial, budaya, serta tingkat pembangunan antar daerah di Indonesia sangat beragam, sehingga kebijakan yang seragam dari pusat tidak selalu efektif bila diterapkan secara langsung di daerah tanpa modifikasi. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi publik di tingkat daerah harus mampu merespons kebutuhan lokal, memperkuat daya saing ekonomi daerah, serta menjamin distribusi manfaat pembangunan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, kebijakan ekonomi publik di daerah juga berperan sebagai alat untuk menciptakan stabilitas dan keberlanjutan fiskal. Pemerintah daerah dapat menggunakan instrumen anggaran, seperti belanja modal, belanja sosial, serta pemberian insentif pajak daerah untuk mendorong investasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas kesempatan kerja. Ketika dirancang secara tepat dan berdasarkan data yang valid, kebijakan ini dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah dari guncangan eksternal. Penelitian oleh Musgrave dan Musgrave (1989) menyatakan bahwa tujuan utama kebijakan ekonomi publik adalah

untuk mencapai efisiensi alokatif, distribusi pendapatan yang adil, dan stabilisasi ekonomi secara makro, yang keseluruhannya juga berlaku dalam konteks pemerintahan daerah yang otonom.¹

Lebih jauh lagi, efektivitas kebijakan ekonomi publik daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi pemerintah daerah itu sendiri. Faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia, transparansi pengelolaan anggaran, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya, daerah yang mampu menyusun kebijakan berdasarkan perencanaan partisipatif dan evidence-based policy cenderung lebih berhasil dalam mencapai target-target pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan melakukan kolaborasi lintas sektor agar kebijakan ekonomi publik dapat benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, dan inklusif.

Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Kebijakan fiskal merupakan salah satu komponen utama dalam kebijakan ekonomi publik yang memiliki pengaruh langsung terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Kebijakan ini merujuk pada penggunaan instrumen anggaran, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks daerah otonom, pengelolaan kebijakan fiskal mencakup perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diarahkan untuk mendukung produktivitas, investasi, dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Melalui belanja daerah yang efektif dan efisien, pemerintah mampu menciptakan stimulus ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

Salah satu aspek penting dari kebijakan fiskal daerah adalah alokasi belanja publik yang proporsional dan berpihak pada pembangunan jangka panjang. Investasi pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian lokal. Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan konektivitas dan mobilitas barang dan jasa, tetapi juga menurunkan biaya logistik dan membuka akses ke wilayah-wilayah tertinggal. Demikian pula, belanja untuk sektor pendidikan dan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan². Namun, efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu menyusun anggaran secara rasional dan berbasis pada data. Sayangnya, dalam praktiknya masih banyak daerah yang menghadapi permasalahan dalam perencanaan dan realisasi anggaran, seperti rendahnya serapan anggaran, tumpang tindih program, serta lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi. Ketidakefisienan ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga dapat menimbulkan pemborosan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, tata kelola fiskal yang baik (good fiscal governance) sangat dibutuhkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.²

Selain dari sisi belanja, kebijakan fiskal daerah juga mencakup pengelolaan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah harus dikelola dengan prinsip keadilan, transparansi, dan efisiensi. Peningkatan PAD menjadi penting agar daerah tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Desa. Ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat dapat membatasi ruang fiskal daerah dalam merespons kebutuhan lokal secara fleksibel. Oleh sebab itu, inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah, seperti digitalisasi layanan pajak dan retribusi, serta optimalisasi aset daerah, menjadi agenda strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan ekonomi lokal.³³

¹ Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.

² Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson Education

³ Mardiasmo. (2009). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: ANDI.

Peran Alokasi Anggaran dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat

Alokasi anggaran publik merupakan salah satu manifestasi utama dari peran negara atau pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif. Melalui kebijakan penganggaran, pemerintah daerah berupaya mengatur distribusi sumber daya ekonomi agar dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat secara proporsional, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi dan sosial. Dalam konteks kebijakan ekonomi publik, pengalokasian anggaran bukan semata kegiatan teknokratis, melainkan proses politik dan sosial yang sarat nilai serta mempertimbangkan preferensi masyarakat yang beragam.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan normatif dari seluruh aktivitas pembangunan, dan dalam sistem desentralisasi fiskal, daerah memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Anggaran daerah yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan infrastruktur dasar memiliki potensi besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Misalnya, pembangunan fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) di wilayah terpencil akan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat berpendapatan rendah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Hal ini tidak hanya berdampak pada indikator makroekonomi seperti penurunan angka kemiskinan dan peningkatan angka harapan hidup, tetapi juga mencerminkan keberpihakan kebijakan fiskal terhadap dimensi kemanusiaan dan keberlanjutan.⁴

Contoh nyata dapat dilihat pada program anggaran berbasis kesejahteraan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Yogyakarta. Dalam beberapa tahun terakhir, kabupaten ini berhasil mengembangkan skema anggaran pro-rakyat seperti program “Bedah Rumah Tidak Layak Huni” dan “Jaring Pengaman Sosial untuk Petani Gagal Panen.” Program-program tersebut bukan hanya memberikan bantuan material, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas lokal. Alokasi anggaran seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam memperkuat ketahanan sosial ekonomi melalui intervensi langsung dan terukur terhadap kondisi riil masyarakat.⁵

Lebih jauh, dalam perspektif ekonomi kelembagaan, peran alokasi anggaran tidak dapat dilepaskan dari sistem tata kelola dan mekanisme partisipatif dalam penyusunan anggaran. Ketika proses perencanaan anggaran melibatkan masyarakat secara langsung melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), maka anggaran yang dihasilkan cenderung lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Partisipasi publik dalam proses ini menjadi elemen penting dalam membangun legitimasi dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Di sisi lain, kurangnya transparansi, dominasi elit lokal, serta birokrasi yang lemah kerap menjadi penghambat dalam mewujudkan alokasi anggaran yang adil dan tepat sasaran. Hal ini mengakibatkan anggaran terserap pada pos-pos yang tidak produktif, seperti belanja pegawai yang tinggi, belanja rutin, dan proyek mercusuar yang minim manfaat langsung bagi masyarakat luas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pendekatan *performance-based budgeting* atau penganggaran berbasis kinerja mulai diadopsi di sejumlah daerah sebagai instrumen reformasi pengelolaan keuangan. Dalam sistem ini, pengalokasian anggaran tidak hanya berdasarkan historis atau kebutuhan administratif, tetapi lebih ditentukan oleh target dan capaian kinerja pembangunan yang terukur. Contohnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan sistem Sakip Award sebagai bentuk apresiasi dan insentif terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang mampu mencapai target kinerja melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.⁶ Reformasi seperti ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggaran publik yang diarahkan secara strategis, berbasis bukti, melibatkan partisipasi masyarakat, serta dikawal oleh sistem tata kelola yang akuntabel, akan menjadi tulang punggung utama dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat secara

⁴ Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.

⁵ Kurniawan, R. (2020). “Evaluasi Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 22(3), 145–162.

⁶ Winarno, B. (2018). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

luas. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari pembangunan sosial, dan keduanya harus disatukan dalam kerangka kebijakan fiskal yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Keterkaitan Transparansi Anggaran dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Transparansi anggaran adalah pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, khususnya pada tingkat pemerintahan desa. Dalam konteks pembangunan desa, transparansi bukan hanya sekadar bentuk pelaporan keuangan kepada publik, melainkan suatu sistem nilai dan mekanisme yang memungkinkan masyarakat memiliki kontrol terhadap jalannya pemerintahan, sekaligus terlibat dalam setiap tahapan pembangunan. Transparansi anggaran mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi penggunaan dana desa yang dapat diakses, dipahami, dan diawasi oleh masyarakat luas secara aktif. Pendekatan ini berangkat dari prinsip bahwa keuangan publik merupakan milik bersama dan oleh karena itu harus dikelola secara terbuka dan akuntabel kepada pemilik kedaulatan, yakni masyarakat itu sendiri.⁷

Secara konseptual, keterbukaan informasi anggaran berfungsi sebagai alat penguatan kapasitas warga dalam pengambilan keputusan pembangunan. Ketika warga memiliki akses terhadap informasi fiskal secara berkala dan jelas, mereka memiliki daya untuk menilai efektivitas program, mengajukan kritik atau masukan, serta berpartisipasi dalam mengontrol kebijakan pembangunan desa. Dalam kerangka partisipasi ini, transparansi anggaran menjadi bagian dari proses pemberdayaan masyarakat desa, di mana warga tidak hanya dilibatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam perencanaan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan mereka. Oleh karena itu, keterkaitan antara transparansi anggaran dan pemberdayaan masyarakat bersifat sinergis dan saling menguatkan; satu tidak akan optimal tanpa yang lain.⁸

Kondisi ini dapat dianalisis melalui pendekatan *agency theory* dan *principal-agent relationship*, di mana kepala desa dan perangkatnya berperan sebagai agen, dan masyarakat sebagai prinsipal. Dalam situasi tanpa transparansi, ketimpangan informasi (*information asymmetry*) dapat terjadi, memungkinkan agen menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya karena lemahnya pengawasan. Transparansi berfungsi sebagai instrumen untuk memperkecil kesenjangan informasi tersebut, sehingga menciptakan relasi kekuasaan yang lebih seimbang dan memperkuat kepercayaan antara pemimpin dan warga. Hal ini menjadi krusial mengingat perputaran dana desa yang besar dalam beberapa tahun terakhir rentan terhadap penyimpangan jika tidak dibarengi sistem kontrol publik yang kuat dan terstruktur.⁹

Dalam praktiknya, beberapa daerah telah menginisiasi bentuk-bentuk inovatif dalam membangun transparansi anggaran. Contohnya adalah Desa Ponggok di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang menerapkan sistem pelaporan keuangan digital berbasis situs resmi dan media sosial desa. Pemerintah desa secara aktif mengunggah laporan penggunaan anggaran, dokumen APBDes, hingga progres fisik pembangunan secara real-time. Warga dapat mengakses informasi ini kapan pun dan memberikan respons atau pengaduan melalui kanal yang tersedia. Selain itu, mereka juga mengadakan forum musyawarah anggaran terbuka, yang tidak hanya dihadiri oleh tokoh masyarakat, tetapi juga ibu rumah tangga, pemuda, dan kelompok rentan lainnya. Dampaknya, warga merasa memiliki kepemilikan terhadap setiap program desa, dan terjadi peningkatan signifikan terhadap partisipasi dalam kegiatan pembangunan serta pengawasan sosial secara sukarela.¹⁰

Lebih jauh, hasil penelitian oleh Kementerian Desa menunjukkan bahwa desa-desa yang mengimplementasikan prinsip transparansi secara menyeluruh cenderung memiliki capaian pembangunan yang lebih baik, lebih rendah risiko konflik, serta menunjukkan peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik desa. Transparansi tidak hanya mempercepat akselerasi pembangunan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat karena adanya rasa keadilan, kepercayaan, dan kesetaraan akses terhadap sumber daya publik. Sebaliknya, desa yang tertutup terhadap informasi anggaran kerap menghadapi resistensi masyarakat, rendahnya kepercayaan publik, serta potensi tingginya praktik penyalahgunaan wewenang.¹¹

Transparansi anggaran desa bukanlah sekadar kewajiban administratif, tetapi strategi pemberdayaan masyarakat yang sangat strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya akan memperkuat sistem tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan profesional, tetapi juga menciptakan masyarakat desa yang melek informasi, kritis, partisipatif, dan

mandiri secara sosial-ekonomi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas literasi fiskal warga desa, pengembangan sistem informasi desa yang inklusif, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran harus menjadi prioritas utama dalam reformasi pengelolaan dana desa ke depan.

Rekomendasi Strategis untuk Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Ekonomi Publik

Untuk memastikan kebijakan ekonomi publik berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, beberapa langkah strategis perlu diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan makroekonomi yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Langkah-langkah ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan menyeluruh agar dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola ekonomi lokal. Oleh karena itu, berikut adalah rekomendasi yang perlu diterapkan secara sistematis.

Pertama, penguatan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan di tingkat daerah harus menjadi prioritas utama. Untuk mencapai hal ini, perlu dilakukan investasi dalam pengembangan kompetensi aparatur pemerintah daerah, baik dalam hal teknis perencanaan kebijakan maupun dalam hal manajemen implementasi.

Dalam konteks ini, pelatihan intensif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk pejabat pemerintah daerah tetapi juga bagi sektor swasta dan masyarakat sipil yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah perlu diberikan pelatihan dalam menggunakan teknik perencanaan berbasis data yang komprehensif, yang memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang potensi ekonomi daerah serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target pembangunan. Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut berbasis pada kebutuhan nyata dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal.¹²

Kedua, partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan harus diperkuat. Perumusan kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, serta akademisi, memiliki beberapa keunggulan. Pertama, hal ini memastikan bahwa kebijakan yang dibuat lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan lokal. Kedua, keterlibatan berbagai pihak akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kebijakan tersebut, yang akan mendorong partisipasi aktif dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan tidak hanya akan memiliki dampak yang lebih besar, tetapi juga lebih mudah diterima dan dilaksanakan. Sebagai contoh, kebijakan yang menysasar sektor ekonomi kreatif, jika disusun dengan melibatkan pelaku usaha lokal, dapat lebih memadai karena memperhitungkan dinamika dan karakteristik pasar lokal yang lebih spesifik. Begitu juga dengan kebijakan yang terkait dengan pengembangan sektor pariwisata atau infrastruktur, di mana peran serta masyarakat sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Selanjutnya, perlu ada penguatan sistem evaluasi dan monitoring yang lebih terstruktur dan berbasis data untuk memantau pelaksanaan kebijakan. Proses evaluasi dan monitoring tidak hanya diperlukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan ekonomi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul selama proses implementasi. Proses ini harus dilakukan secara berkala dan transparan agar dapat memberikan informasi yang valid dan akurat untuk perbaikan kebijakan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk pengumpulan data secara real-time. Dengan adanya sistem ini, pemerintah daerah dapat dengan cepat menanggapi permasalahan yang muncul dan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang sedang berjalan. Contohnya, kebijakan terkait pengelolaan sektor transportasi publik di suatu daerah dapat dimonitor dengan memanfaatkan aplikasi berbasis data yang memudahkan masyarakat dalam memberikan feedback dan laporan terkait pelayanan yang diberikan. Feedback ini bisa langsung diolah dan dianalisis oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang diterapkan.

Kemudian, dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan sistem pengelolaan anggaran yang lebih baik. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan mengadopsi sistem keuangan berbasis digital yang memungkinkan monitoring alokasi dan penggunaan anggaran secara terbuka dan

transparan. Ketika masyarakat dapat memantau langsung bagaimana anggaran digunakan dalam proyek pembangunan daerah, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat

Transparansi ini tidak hanya mengurangi potensi penyalahgunaan dana, tetapi juga mengarah pada efisiensi pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Selain itu, penguatan sistem akuntabilitas melalui audit yang terintegrasi dan pengawasan yang lebih ketat oleh lembaga eksternal dan internal juga sangat penting dalam mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.¹³

Selain itu, penting untuk memperhatikan aspek keberlanjutan dalam kebijakan ekonomi daerah. Keberlanjutan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi jangka pendek, tetapi juga oleh aspek sosial dan lingkungan yang harus dijaga agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi Masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan ekonomi berbasis keberlanjutan ini juga membuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor-sektor yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan pariwisata berbasis ekologi.

Misalnya, kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan di daerah-daerah dengan potensi energi matahari atau angin dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil, sekaligus membuka peluang investasi baru dalam bidang teknologi hijau yang dapat memberikan dampak ekonomi positif jangka panjang.¹⁴

Sebagai contoh, daerah seperti Bali dan Yogyakarta telah berhasil menerapkan kebijakan yang berfokus pada pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis pada kearifan lokal. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya pemerintah daerah yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Di Bali, misalnya, pengelolaan pariwisata berbasis desa adat telah memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal, sembari menjaga kelestarian lingkungan dan budaya setempat. Begitu juga di Yogyakarta, pengembangan pariwisata berbasis budaya telah membuka peluang baru dalam pengembangan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan PDRB daerah secara signifikan.

SIMPULAN

Adanya sebuah daerah yang semakin maju karena pemerintahnya pintar mengelola uang dan sumber daya untuk kepentingan warganya. Kebijakan ekonomi publik, seperti rencana anggaran daerah, memungkinkan pemerintah lokal membangun jembatan, mendukung pedagang kecil, atau memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan kebebasan yang diberikan oleh otonomi daerah, pemerintah bisa menyesuaikan rencana mereka sesuai keunikan wilayahnya mungkin mendukung petani di desa atau membangun tempat wisata untuk menarik pengunjung. Jika dilakukan dengan hati-hati, langkah ini bisa menciptakan banyak peluang kerja, menaikkan pendapatan daerah, dan membuat hidup warga lebih baik. Daerah-daerah sukses menunjukkan bahwa kerja sama antara rencana yang jelas dan dukungan warga adalah resep yang ampuh.

Namun, tidak semua cerita berjalan mulus. Kadang, rencana yang kurang tepat atau pengelolaan yang asal-asalan membuat uang daerah terbuang sia-sia. Ada daerah yang kesulitan karena pemerintahnya kekurangan tenaga ahli atau tidak cukup memantau jalannya program. Akibatnya, impian untuk memajukan ekonomi lokal jadi tertunda. Untuk mengatasi ini, pemerintah daerah perlu mendengarkan warga dan membuat kebijakan berdasarkan fakta di lapangan. Contohnya, di Desa Ponggok, Jawa Tengah, keterbukaan soal penggunaan anggaran membuat warga merasa dihargai dan ikut mengawasi proyek desa. Ini tidak hanya memperkuat kepercayaan, tapi juga memastikan pembangunan berjalan lancar dan tahan lama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Ekonomi Publik pada Semester Genap Tahun Pembelajaran 2024/2025 Bapak Dr. Dian Herdiana, S.IP. M.Ap yang telah memberi dukungan dan telah membimbing kami dalam penyusunan

artikel ini sehingga kami bisa menyelesaikannya dengan baik, serta kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dari awal sampai dengan akhir penyusunan artikel sesuai dengan rencana.

REFERENCES

- Anonim. (2024). *Ekonomi Publik: Teori dan Penerapan Kebijakan Fiskal*. Universitas Mataram.
- Desyastridan, D., & Indya, N. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Sebi*.
- Jurnal Sebi. (2023). Studi Kasus Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Sebi*.
- JPTAM. (2023). Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- Utami, R. (2023). Analisis Kebijakan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Repository Universitas Terbuka*.
- Abidin, Z. (2020). Perencanaan pembangunan desa partisipatif: Teori dan praktik. Yogyakarta, Indonesia: Deepublish.
- Bappenas. (2022). Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024. Jakarta, Indonesia: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Dwiyanto, A. (2018). Reformasi tata pemerintahan: Membangun pemerintahan yang berdaya guna dan dipercaya masyarakat. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press.
- Hadi, S. (2021). Keberlanjutan ekonomi daerah: Pengembangan sektor ekonomi berbasis kearifan lokal. *Jurnal Pembangunan Regional*, 17(3), 142–157.
- Indonesia Corruption Watch. (2021). Potret pengelolaan dana desa: Antara transparansi dan kerentanan korupsi. Jakarta, Indonesia: ICW.
- Kemendesa PDTT. (2021). Panduan umum sistem keuangan desa (Siskeudes) versi terbaru. Jakarta, Indonesia: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Kemendesa PDTT. (2023). Laporan evaluasi nasional dana desa dan pemberdayaan masyarakat. Jakarta, Indonesia: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Kurniawan, R. (2020). Evaluasi program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 22(3), 145–162.
- Mardiasmo. (2019). Akuntansi sektor publik: Edisi revisi. Yogyakarta, Indonesia: Andi.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Nurhayati, D., & Arifin, M. (2021). Inovasi transparansi anggaran desa melalui media digital: Studi kasus Desa Ponggok. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Desa*, 8(1), 85–102.
- Nurhayati, S., & Astuti, R. (2019). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan ekonomi di daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 15(2), 123–135.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Prasetyo, B. (2020). Transparansi fiskal dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 15(3), 197–210.
- Putri, N. D. (2020). Efektivitas sistem keuangan desa dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 5(2), 133–148.
- Rahmawati, Y., & Kurniasih, D. (2020). Implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 17(2), 123–138.
- Rohman, A., & Sukmana, R. (2022). Sistem informasi keuangan desa (Siskeudes): Analisis efektivitas dan hambatan implementasi di tingkat desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 17(1), 45–59.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Sumaryadi. (2016). Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat. Jakarta, Indonesia: CV Ghalia Indonesia.

- Syamsuddin, L. (2021). Mewujudkan akuntabilitas publik melalui transparansi pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Publik*, 3(1), 54–66.
- Rahmawati, Y., & Kurniasih, D. (2020). Implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 17(2), 123–138.
- Saragih, E. A., & Manurung, D. T. H. (2021). Pengaruh pengawasan dan kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(1), 21–36.
- Widodo, J. (2020). Reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola desa berbasis digital. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Negara*, 6(3), 233–247.
- World Bank. (2007). *Empowering the poor through budget transparency and participation*. Washington, DC: The World Bank.